



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## INDIKATOR PEMBANGUNAN TIDAK TERCAPAI, PERLUNYA PERBAIKAN PERENCANAAN RPJMN SELANJUTNYA

**Edmira Rivani**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[edmira.rivani@dpr.go.id](mailto:edmira.rivani@dpr.go.id)

**Fauzan Lazuardi Ramadhan**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[fauzan.ramadhan@dpr.go.id](mailto:fauzan.ramadhan@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan. RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020. Pada RPJMN disebutkan bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan, terdapat 505 indikator yang terbagi ke dalam tujuh agenda pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Perpres No. 18 Tahun 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas wajib melakukan evaluasi terhadap RPJMN yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN untuk nantinya dilaporkan kepada Presiden.

Di akhir tahun pelaksanaannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa dari 19 indikator pembangunan, diproyeksikan hanya lima indikator atau 26,31% yang tercapai. Ke lima indikator yang diproyeksikan tercapai adalah (i) nilai tukar petani; (ii) skor pola pangan harapan; (iii) penurunan emisi gas rumah kaca; (iv) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (v) angka kematian ibu. Data yang disampaikan hanya sebagian kecil dari indikator yang ada. Salah satu indikator yang tidak tercapai adalah pada sektor perekonomian. Padahal, sektor perekonomian adalah hal terpenting dalam mewujudkan Indonesia keluar dari *middle income trap* sesuai dengan target yang dibuat oleh Bappenas.

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan bernegara. Ketidaktercapaiannya indikator pembangunan mengindikasikan adanya permasalahan dalam siklus perencanaan pembangunan itu sendiri. *Pertama*, pada tahapan perencanaan, pada tahapan ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul, antara lain (i) basis data yang digunakan dalam menentukan target indikator pembangunan, sejak ditetapkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ketidaksinkronan data selalu menjadi permasalahan, dengan data yang salah dikhawatirkan kebijakan yang diambil tidak akurat; (ii) sejak tahun 2020 – 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mencatatkan defisit. Jika dilihat dari posturnya, penerimaan negara bertumpu pada sektor perpajakan, maka dari itu perlu adanya perluasan sumber pendanaan inovatif lainnya; (iii) perencanaan pembangunan yang ada saat ini terlalu bersifat sektoral. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan program guna mencapai tujuan pembangunan bersama.

*Kedua*, pada tahapan pengendalian masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator, serta Kantor Staf Presiden dalam melakukan pengendalian program pembangunan. Maka dari itu,

perlu adanya kejelasan pembagian tugas agar penggerakan sumber daya dapat lebih optimal dan efisien. Ketiga, pada tahapan evaluasi perlu adanya penguatan peran dari Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan perannya. Selain hal tersebut, penerapan mekanisme *reward* dan *punishment* diharapkan mampu memotivasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan.

Ketidaktercapaian target indikator pembangunan diharapkan bukan sinyal dari kegagalan, tetapi perlu dihadapi dengan evaluasi yang tepat untuk melakukan perbaikan pada perencanaan RPJMN 2025 – 2029. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan perhatian oleh Pemerintah. *Pertama*, Pemerintah diharapkan tidak menetapkan target secara agresif dan ambisius, perlu penerapan metode perhitungan yang tepat agar target lebih realistis dan dapat dicapai. *Kedua*, dalam perencanaan perlu penguatan konsep Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) agar pembangunan tidak bersifat sektoral. *Ketiga*, perlu adanya prioritas pendanaan pembangunan, pendanaan diharapkan diberikan kepada program yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target pembangunan. *Keempat*, perlu dikembangkan sumber pendanaan inovatif dalam pendanaan pembangunan, agar tidak bertumpu pada penerimaan dari sektor perpajakan. Serta *Kelima*, perlu penguatan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* proses perencanaan dan pembangunan nasional.

## Atensi DPR

Ketidaktercapaiannya target indikator pembangunan pada periode RPJMN 2020 – 2024 perlu menjadi perhatian bersama. Hal tersebut, mengindikasikan adanya permasalahan dalam siklus perencanaan. Evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan selanjutnya dapat menghasilkan program yang berkualitas. DPR RI, khususnya Komisi XI perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun dokumen evaluasi pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024. Pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Komisi XI dengan berfokus pada, pertama permasalahan yang timbul ketika proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Kedua, memperbaiki tata kelola data yang lebih terintegrasi agar dapat digunakan sebagai baseline penyusunan target rencana pembangunan kedepannya. Ketiga, mendorong prioritas pendanaan pembangunan dengan pendekatan rencana pembangunan tematik dan kolaboratif antar sektor. Keempat, mendorong pengembangan sumber pendanaan inovatif untuk pendanaan pembangunan. Serta kelima, menguatkan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house proses dalam siklus perencanaan dan pembangunan nasional.

## Sumber

antaranews.com, 15 November 2024;  
cnbcindonesia.com, 13 November 2024;  
Koran Jakarta, 14 November 2024;

Koran Kontan, 13 dan 14 November 2024; dan  
tempo.co, 12 November 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024